

Korban Talangsari Terus Mencari Keadilan

Sekitar 100-an korban peristiwa Talangsari, Lampung 1989 berkumpul di Jakarta untuk mempertanyakan keadilan bagi mereka. Komunitas korban yang datang dari Lampung dan Solo ini didampingi oleh KontraS, Yaphi Solo, LBH Lampung, LBH Semarang, komunitas korban pelanggaran HAM lainnya, dan beberapa organisasi mahasiswa dan sipil lainnya berencana untuk menduduki Komnas HAM yang hingga hari ini belum mengumumkan sikapnya soal kasus ini. Sudah bertahun-tahun Komnas HAM membentuk suatu tim investigasi yang sudah berganti-ganti, namun hasilnya masih tanda tanya. Kasus Talangsari terjadi 17 tahun lalu di wilayah Lampung Tengah. Saat itu pemerintah menyatakan penduduk Talangsari sebagai kelompok Islam sesat dan melakukan penyerangan lewat suatu operasi militer yang dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam Lampung, Hendropriyono (mantan Kepala BIN). Dalam investigasi KontraS tercatat ratusan korban kehilangan nyawa dan sebagian menjadi korban penghilangan paksa. Dalam memperjuangkan keadilan, korban Talangsari berharap Komnas HAM – sesuai dengan kewenangannya yang diatur oleh Undang-Undang – bisa meningkatkan kasus ini menjadi bersifat pro justicia seperti yang dijelaskan pada UU No.26/2000 Tentang Pengadilan HAM.

Kegiatan di Jakarta kali ini dimulai dengan mengadakan diskusi publik untuk mengenang 17 tahun peristiwa dan juga mempertanyakan tanggung jawab negara. Acara diskusi publik itu diselenggarakan di Gedung Jakarta Media Center, Senin 6 Februari 2006. Hadir dalam acara yang diselenggarakan Paguyuban Korban Talangsari Lampung antara lain Widaningsih dan Sugeng Yulianto, keduanya adalah korban tragedi tersebut. Dalam kesempatan itu, hadir pula Koordinator Kontras Usman Hamid, peneliti Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Abdul Syukur, dan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI Nursyahbani Katjasungkana.

Esok harinya pada tanggal 7 Februari 2006, korban Talangsari melakukan audiensi terhadap Pengurus Besar Nahdaltul Ulama/PBNU di Jakarta dan bertemu dengan salah satu pengurusnya, Ahmad Bagja. Pada kesempatan itu PBNU menyatakan bahwa memang komunitas Talangsari Lampung menjadi korban pelanggaran HAM dan bukan merupakan komunitas Islam sesat sebagaimana yang didengungkan oleh pemerintahan Orde Baru saat itu. Meski bukan lembaga penegak hukum, namun PBNU memberikan dukungan moral terhadap para korban.

Kegiatan korban Talangsari kemudian dilanjutkan dengan menemui Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin pada hari Rabu, 8 Februari 2006. Pada kesempatan itu Ketua PP Muhammadiyah memberikan bantuan moril dan menghimbau kepada semua lembaga negara untuk mendukung perjuangan korban. PP Muhammadiyah juga ikut prihatin atas penderitaan yang dialami para korban dan bersyukur kedatangan korban ke PP Muhammadiyah juga ikut membuka memori kolektif kelompok Muslim Indonesia yang agak terbatas ini terbuka lagi. Din Syamsuddin juga menilai kasus Talangsari dan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya di Indonesia, seperti kasus Tanjung Priok merupakan rekayasa rezim Soeharto untuk menciptakan kesan bahwa agama Islam adalah aliran keras.

